

Analisis Kausalitas Belanja Modal, Bantuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia

Rahmi Handayani*, Ahmad Soleh, Agus Santoso, Yunie Rahayu

Universitas Muhammadiyah Jambi

*Correspondence email: rahmi.handayani@umjambi.ac.id, ahmad.soleh@umjambi.ac.id, agus.santoso@umjambi.ac.id, yunierahayu.2106@gmail.com

Abstrak. Pembangunan manusia merupakan ujung tombak dalam perencanaan pembangunan. Untuk mengukur seberapa besar capaian pembangunan manusia maka digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai IPM disuatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut semakin baik. Sehingga seringkali IPM dianggap telah dapat mewakili tingkat kesejahteraan penduduk, karena dalam IPM mencakup unsur yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Untuk menopang proses pembangunan manusia maka perlu adanya alokasi dalam pembiayaan. Besarnya belanja modal dan belanja bantuan sosial tentu mempunyai keterkaitan yang erat dengan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi menunjukkan adanya fenomena menarik dimana Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial mengalami fluktuasi setiap tahunnya namun IPM selalu mengalami peningkatan. Atas dasar masalah tersebut maka penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi, Hubungan Kausalitas (timbal balik), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta respon IPM akibat guncangan (shock) dari Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *library reseach*, dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang bersumber dari laporan statistik keuangan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi dan literature lainnya yang relevan selama periode 2010-2019 di 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi belanja modal, bantuan sosial dan IPM digunakan model pertumbuhan, dan alat analisis untuk menganalisis hubungan kausalitas dan respon IPM akibat Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial digunakan model VAR (*Vector Autoregression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi belanja modal, bantuan sosial dan IPM di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami trend yang positif. Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara variabel dependen dan variabel independen serta dalam periode penelitian jika terjadi *shock* atau guncangan pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial maka akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Infrastruktur; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract. Human development is the spearhead in development planning. To measure how much human development achievements are used, the Human Development Index (HDI) indicator is used. The higher the HDI value in one region, the better the level of welfare in the region. So often HDI is considered to have been able to represent the level of welfare of the population, because in HDI includes elements that include economic and non-economic variables. To sustain the human development process, there needs to be an allocation in financing. The amount of capital expenditure and social assistance spending certainly has a close relationship with human development indexes. Based on data from BPS Jambi Province shows an interesting phenomenon where Capital Expenditure and Social Assistance Spending fluctuate every year but HDI always increases. On the basis of these problems, this research is very important and interesting to do. The purpose of this study is to analyze conditions, Causality Relations (reciprocity), Capital Expenditure, Social Assistance Spending and Human Development Index (HDI), as well as hdi response due to shocks from capital expenditure and social assistance spending. This research uses qualitative and quantitative descriptive analysis with a library reseach approach, using secondary data in the form of panel data sourced from the financial statistics reports of local governments and the Central Statistics Agency (BPS) as well as other relevant agencies and literature during the period 2010-2019 in 11 districts / cities in Jambi Province. Analytical tools used to describe the condition of capital gains, social assistance and HDI are used growth models, and analytical tools to analyze causality relationships and HDI responses due to Capital Expenditure and Social Assistance Spending are used VAR (*Vector Autoregression*) models. The results showed that the condition of capital expenditure, social assistance and HDI in regencies / cities in Jambi Province experienced a positive trend. There is a one-way causality relationship between dependent variables and independent variables and in the research period if there is a shock or shock in Capital Expenditure and Social Assistance Spending it will affect the Kab / Kota Human Development Index in Jambi Province.

Keywords: Infrastructure; Economic Growth

Pendahuluan

Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia adalah belanja daerah. Belanja daerah dalam hal ini adalah belanja modal dan belanja bantuan sosial yang keduanya merupakan bagian dalam APBD dan berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan melalui indeks pembangunan manusia. Poin pentingnya adalah sejauhmana belanja daerah tersebut mampu memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan. Belanja modal dan belanja bantuan sosial sama-sama mempunyai tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun dalam alokasi yang berbeda. Oleh karena itu peran keduanya sangat penting, jika belanja bantuan sosial dan belanja modal disalurkan tepat sasaran maka akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sehingga secara otomatis akan meningkatkan Indeks pembangunan manusia.

Sasana (2012) menyatakan bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki IPM yang tinggi pula. Tingkat IPM yang tinggi pun belum tentu merupakan kontribusi penuh dari alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencapaian tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat itu sendiri (Badrudin, 2011); (Mirza, 2012). Namun, pengalokasian belanja rutin dan belanja modal yang dilakukan secara tepat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi menunjukkan adanya fenomena menarik dimana belanja modal dan belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2019, tetapi IPM selalu mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi. Ini berarti bertentangan dengan teori yang ada dan terdapat sesuatu yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kondisi Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan IPM, Hubungan Kausalitas antara Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan IPM dan Respon IPM akibat Stimulus dari Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah perluasan pilihan bagi manusia dengan manusia sebagai fokusnya (Qasim, 2013). Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik dan nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia serta gender. Pembangunan manusia memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif dari semua sektor (BPS, 2001). Berbagai konsep yang dibahas dalam pembangunan manusia seperti: konsep dan ukuran pembangunan manusia, dimensi global pembangunan manusia, partisipasi penduduk, dimensi baru dari keamanan manusia, gender pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan masih banyak lagi. Sementara menurut Firdausy (1998), ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu: pemerataan dan kesetaraan, berkelanjutan, produktivitas, dan pemberdayaan.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. IPM digunakan untuk merefleksikan sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya melalui upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan partisipasi penduduk dalam pembangunan. BPS (2001) menyebutkan bahwa menurut skala internasional indeks pembangunan manusia dikategorikan menjadi 3 kategori dan 4 sub kategori sebagai berikut:

Tabel 1
Kategori dan Sub Kategori Indeks Pembangunan Manusia (Menurut Skala Internasional)

No.	Kategori	Sub kategori	Angka IPM
1	Tinggi	Tinggi	80,00 - 100
2	Menengah	Menengah Atas Menengah Bawah	66,00 – 79,99 50,00 – 65,99
3	Rendah	Rendah	0 – 49,99

Sumber: BPS (2001)

Belanja Modal

Belanja modal merupakan merupakan belanja untuk investasi pembangunan sarana prasarana publik, seperti sarana transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, telekomunikasi dan lain lain baik yang berupak fisik maupun non fisik. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/ investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya dalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. (Azzahra dkk, 2016).

Belanja Bantuan Sosial

Menurut PMKR 254/PMK. 05/2015, tentang belanja bantuan sosial pada K/L, bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial meningkatkan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Resiko sosial dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Metode

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *library reseach*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang bersumber dari laporan statistik keuangan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan pada 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Alat analisis yang digunakan dalam menjawab permasalahan pertama kondisi Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan IPM maka digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan model perkembangan. Model VAR (*Vector Autoregression*) yaitu mengetahui hubungan timbal balik antar variabel maka alat analisis yang digunakan adalah analisis *Granger Causality* dan menganalisis respon dari IPM akibat guncangan (*shock*) Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial maka digunakan alat analisis *Impuls Response*. Dengan melalui beberapa tahapan diantaranya: Uji *Stasioneritas (unit root test)*, Uji *kointegrasi* dan uji *kausalitas granger*. (Sari & Supadmi, 2016).

Pendekatan VAR merupakan permodelan setiap variabel endogen dalam sistem sebagai fungsi dari Lag semua variabel endogen dalam sistem (Enders, 2004). Estimasi model VAR untuk melihat pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi dapat dituliskan sebagai berikut: (Juanda dkk, 2012)

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it-n} + \beta_2 BM_{it-n} + \beta_3 BS_{it-n} + e_{it}$$

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 BM_{it-n} + \beta_2 IPM_{it-n} + \beta_3 BS_{it-n} + e_{it}$$

$$BS_{it} = \beta_0 + \beta_1 BS_{it-n} + \beta_2 IPM_{it-n} + \beta_3 BM_{it-n} + e_{it}$$

dimana : IPM : Indeks Pembangunan Manusia; BM : Belanja Modal (Juta Rupiah); BS : Belanja Bantuan Sosial (Juta Rupiah); β_0 : Konstanta; β_1, β_2 : Koefisien regresi; e_{it} : Unsur kesalahan pengganggu; i : i menunjukkan *cross section* (n) dan t adalah periode waktu (2010,...,2019); $t-n$: Periode sebelumnya

Hasil

Kondisi Belanja modal, belanja Bantuan dan IPM

Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Jambi

Berdasarkan data yang ada, realisasi belanja terbesar pada tahun 2019 yang mencapai 3,5 triliun lebih, realisasi belanja modal terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,8 triliun lebih.

Tabel 2
Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Tahun	Belanja Modal (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	937.986	-
2014	818.059	-12,79
2015	2.737.641	234,65
2016	2.784.787	1,72
2017	3.000.103	7,73
2018	2.913.597	-2,88
2019	3.688.004	26,58
2020	3.607.907	-2,17
Rata - Rata Pertumbuhan		36,12

Sumber: data olahan

Perkembangan Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Jambi

Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tiak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali. Bantuan sosial dapat dalam bentuk uang maupun barang. adapun Bantuan sosial dalam bentuk barang dapat berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran tetapi diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

Tabel 3
Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2018

Tahun	Belanja Bantuan Sosial (Juta Rp)
2013	33.441
2014	19.519
2015	40.852
2016	23.957
2017	39.130
2018	34.776
2019	50.076
2020	76.647

Rata - Rata Pertumbuhan

Sumber: data olahan

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi

Kesuksesan Provinsi Jambi dalam membangun sumberdaya manusia dapat tercermin dari angka IPM, artinya semakin tinggi IPM di provinsi Jambi maka akan semakin berhasil pembangunan manusia oleh pemerintah Provinsi Jambi.

Tabel 4
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	67.49	67.96	68.89	69.68	70.03	70.59	70.95	71.21
Merangin	65.82	66.21	67.40	67.86	68.30	68.81	69.07	69.19
Sarolangun	67.13	67.67	68.10	68.73	69.03	69.41	69.72	69.86
Batanghari	67.24	67.68	68.05	68.70	68.92	69.33	69.67	69.84
Muarao Jambi	65.14	65.71	66.66	67.55	67.86	68.34	69.01	69.18
Tanjung Jabung timur	59.41	59.88	61.12	61.88	62.61	63.32	63.92	64.43
Tanjung jabung barat	63.54	64.04	65.03	65.91	66.15	67.13	67.54	67.54
Tebo	65.91	66.63	67.29	68.05	68.16	68.67	69.02	69.14
Bungo	67.54	67.93	68.34	68.77	69.04	69.42	69.86	69.92
Kota jambi	74.21	74.86	75.58	76.14	76.74	77.41	78.26	78.37
Kota sungaipenuh	72.09	72.48	73.03	73.35	73.75	74.67	75.36	75.42
Provinsi jambi	67.76	68.24	68.69	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29

Sumber: data olahan

Hubungan Kausalitas antara Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Sebelum menganalisis hubungan kausalitas antara masing-masing variabel, perlu dilakukan terlebih dahulu uji stasioneritas dan uji kointegrasi. Tujuan uji stasioneritas ini untuk menganalisis data time series stasioner ada tidak stasioner, karena pada umumnya data time series tidak stasioner dan regresi dengan menggunakan data yang tidak stasioner akan menyebabkan *spurious regression* (ditandai dengan nilai R^2 yang tinggi dan *t-stat*, *F-stat* yang signifikan tetapi *dw* relatif kecil $< 0,5$). Uji stasioneritas variabel pada data panel menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey Fuller*) atau PP (*Phillips-Peron*). Data dikatakan tidak mengandung unit root atau bersifat stasioner jika nilai Prob. ADF dan PP lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Uji dilakukan dengan menggunakan program EViews 8.0 dengan hasil yang digambarkan melalui tabel yang telah dilampirkan. Kesimpulan dari hasil uji akar unit yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian tidak seluruhnya stasioner pada tingkat level. Ketidakstasioneran data dilihat dari nilai prob. ADF dan PP yang lebih besar dari nilai kritis pada taraf nyata 1%, 5% maupun 10%. Oleh karena itu, pengujian akar-akar unit ini perlu dilanjutkan pada tingkat *first difference*. Setelah dilakukan uji akar pada *first difference*, barulah semua data stasioner pada *critical value* baik 1%, 5% maupun 10% (*terlampir*). Artinya data yang digunakan pada penelitian ini terintegrasi atau stasioner pada tingkat *first difference*. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini data belanja modal, belanja bantuan sosial dan IPM stasioner pada tingkat *first difference* dan boleh dilanjutkan dengan uji kointegrasi.

Uji kointegrasi disini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat jangka panjang antara masing-masing variabel. Apabila terdapat data yang stasioner pada proses diferensi data, maka kita harus melakukan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah data mempunyai hubungan dalam jangka panjang atau tidak. Apabila terdapat kointegrasi maka model ini disebut model VECM, tetapi apabila tidak terdapat kointegrasi maka model ini disebut model VAR dengan data diferensi (VAR in difference). Dari hasil uji stasioner diketahui bahwa terdapat data yang stasioner pada proses diferensi data, maka untuk selanjutnya harus dilakukan uji kointegrasi. Berdasarkan hasil uji kointegrasi data

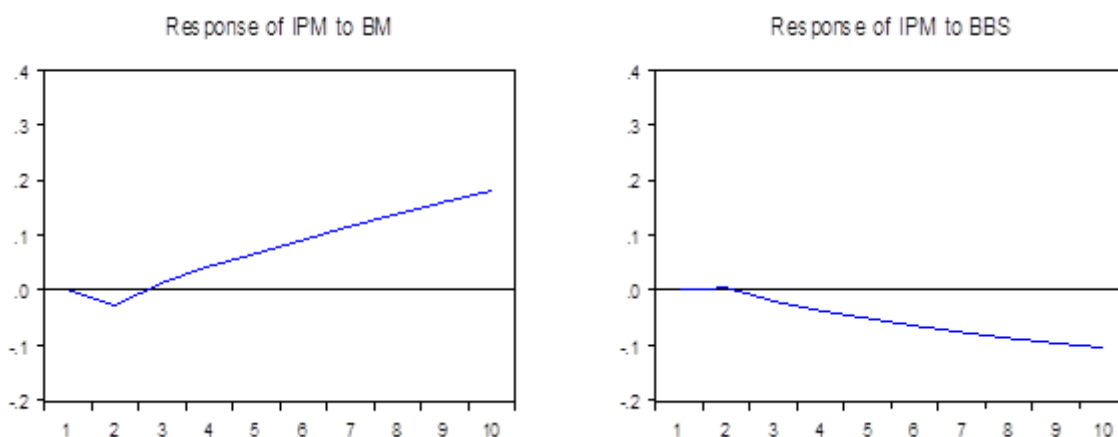
panel yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai prob. ADF, nilai prob. ADFnya lebih besar daripada nilai kritis pada tingkat $\alpha=5\%$. Yaitu $0,29 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kointegrasi antar variabel dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang antara Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.

Setelah dilakukannya uji stasioneritas dan uji kointegrasi, maka dilanjutkan dengan uji kausalitas atau *Granger Causality test* yang digunakan untuk melihat hubungan kausalitas (timbal balik) antara variabel-variabel yang diteliti yaitu IPM, BM dan BBS. Kesimpulan dari hasil uji *causality test* yang telah dilakukan yaitu : *BM does not Granger Cause IPM* = 0.1409; *IPM does not Granger Cause BM* = 0.0702; *BBS does not Granger Cause IPM* = 0.3815; *IPM does not Granger Cause BBS* = 0.2149. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. IPM tidak mempengaruhi BM, karena nilai probabilitas-nya lebih besar dari tingkat signifikan 5% ataupun 10% $\rightarrow (0,05 < 0,1409 > 0,10)$.
2. BM mempengaruhi IPM, karena nilai probabilitas-nya lebih kecil dari tingkat signifikan 10% $\rightarrow (0,07 < 0,10)$.
3. IPM tidak mempengaruhi BBS, karena nilai probabilitas-nya lebih besar dari tingkat signifikan 5% ataupun 10% $\rightarrow (0,05 < 0,3815 > 0,10)$.
4. BBS tidak mempengaruhi IPM, karena nilai probabilitas-nya lebih besar dari tingkat signifikan 5% ataupun 10% $\rightarrow (0,05 < 0,2149 > 0,10)$.

Berdasarkan hasil uji Kausalitas Granger menunjukkan terjadi hubungan kausalitas satu arah antara Belanja Modal dengan IPM selama kurun waktu 2013-2018. Sedangkan, Belanja Bantuan Sosial tidak mempengaruhi IPM, begitu pula sebaliknya. Pola atau arah hubungan kausalitas adalah dari belanja modal ke IPM. Artinya, Belanja Modal mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tetapi dengan pengaruh yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 7%.

Analisis Respon Akibat Perubahan Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi



Sumber: data olahan

Gambar 1
Grafik Impuls Response (IRF)

Gambar 1 response of IPM to BM, menjelaskan respon IPM, karena adanya *shock* atau guncangan pada variabel BM (Belanja Modal). Gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. Perubahan yang terjadi pada belanja modal ini membutuhkan waktu dua triwulan untuk dapat meningkatkan IPM hingga triwulan 10, karena penggunaan alokasi belanja modal yang digunakan untuk infrastruktur layanan publik ini tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya karena dibutuhkan rentan waktu yang lama untuk memperbaiki sarana dan prasarana publik. Jadi pengaruh belanja modal ini berpengaruh tetapi pengaruhnya secara tidak langsung karena dibutuhkan beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran belanja modal secara tepat sasaran yaitu untuk memperbaiki sarana dan prasarana publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur lainnya. Sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pembangunan manusia yang tergambarkan oleh meningkatnya angka indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Gambar 1 juga menjelaskan respon IPM, karena adanya *shock* atau guncangan pada variabel BBS (Belanja Bantuan Sosial). Adanya guncangan pada BBS periode 2013-2018 sama sekali tidak mampu meningkatkan angka IPM, malah menyebabkan terjadinya penurunan angka IPM. Jadi, berdasarkan hasil olahan data dilihat bahwa

guncangan yang terjadi pada belanja bantuan sosial kabupaten/kota di provinsi jambi periode 2013-2018 tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : (Latrini, 2019)

1. Anggaran belanja bantuan sosial di Provinsi Jambi yang masih sangat kecil sekali, sehingga belum dapat dikatakan mampu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan publik baik dalam bentuk bantuan berupa barang maupun uang sesuai dengan tujuan dari belanja bantuan sosial itu sendiri.
2. Adanya kasus beasiswa yang bermasalah di Provinsi Jambi yang dananya diambil dari anggaran belanja bantuan sosial. Karena seharusnya dana beasiswa tidak diambil dari belanja bantuan sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
3. Penggunaan anggaran belanja bantuan sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti transportasi, pembayaran tagihan, pembelian laptop, dll.
4. Faktor-faktor tersebut merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada pengalokasian dana belanja bantuan sosial, sehingga tidak tepat sasaran. Seharusnya belanja ini digunakan untuk membantu masalah masalah sosial yang ada sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan pengalokasian yang tidak tepat sasaran ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan untuk mengatasi masalah sosial seperti pendidikan, kemiskinan ataupun lainnya, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera dan membuat angka IPM menjadi turun.

Simpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. Kondisi belanja modal, bantuan sosial dan IPM di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dan trend yang positif.
2. Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara variabel dependen dan variabel independen. Dimana Belanja Modal mempengaruhi IPM tetapi pengaruhnya sangat kecil sekali karena hanya sebesar 7%. Artinya, alokasi Belanja Modal belum mampu untuk dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial tidak memiliki hubungan kausalitas dengan IPM, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dalam periode penelitian jika terjadi *shock* atau guncangan pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial maka akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jambi. Jadi, adanya *shock* atau guncangan yang terjadi pada Belanja Modal akan memberikan dampak positif terhadap IPM yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tetapi dengan pengaruh yang sangat kecil sekali.

Daftar Pustaka

- Azzahra, F., Prihanto, P. H., & Amzar, Y. V. 2016. Analisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5(2).
- Badrudin, R., & Khasanah, M. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 9(1).
- BPS. 2001. Statistik Indonesia.
- Enders W. 2004. *Applied Econometric Time Series*. John Willey and Sons, Inc
- Firdausy, C. 1998. *Dimensi manusia dalam pembangunan berkelanjutan*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. IPB Press. Bogor.
- Latrini, M. Y., 2019. Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2).
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- PMKR. 254/PMK.05/2015. Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara.
- Qasim, A. W. 2013. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2013. *Pakistan Development Review*, 52(1), 95-96.
- Sasana, H. 2012. *Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409-2438.